

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DALAM
MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus Pada Kantor Camat Tebing Syahbandar Kab. Serdang Bedagai)**

**Marpaida Situmeang¹⁾, Ratna Sari Dewi²⁾ Rizqi Fadhlina Putri³⁾
Junita Putri Rajana Harahap⁴⁾**

^{1,2} Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muslim Nusantara
Al-Washliyah

email: marpaidasitumeang@gmail.com rsdewilubis@umaw.ac.id

Abstract : The Serdang Bedagai Regency Government has implemented PP 71 of 2010 concerning government accounting standards regarding the presentation of accrual-based financial reports. The purpose of the study was to determine the Analysis of the Implementation of Accounting Information Systems in Improving the Quality of Regional Government Financial Reports (Case Study at the Tebing Syahbandar District Office, Serdang Bedagai Regency). This study uses a qualitative research method, where researchers will collect data by observation, collect data in the field, and conduct direct interviews by directly visiting sources at the research location, interviews were conducted with the finance department. To obtain the data needed in this study, the author conducted this research at the Tebing Syahbandar District Office. Researchers can adjust the data collection techniques used to the conditions at the research location. Overall, the 2023 equity change report reflects improvements in the office's financial position and the effectiveness of financial management. The implementation of the Accounting Information System has helped achieve better transparency and supported positive equity increases, providing a strong foundation for future financial stability and growth. The use of the Regional Management Information System (SIMDA) in accrual-based regional financial management has brought about a significant transformation in the way local governments manage, record, and report their finances. SIMDA helps improve the accuracy, transparency, and speed of the financial report preparation process at the Tebing Syahbandar Sub-district Office.

Keywords: Accounting Information System, Financial Report Quality, SIMDA

1. PENDAHULUAN

Perkembangan reformasi yang terjadi di Indonesia memberikan pembaharuan pengetahuan perihal tata kelola finansial pemerintahan, berupa pemerintahan tingkatan pusat ataupun daerah. Sistematika tata kelola keuangan juga banyak terjadi perubahan sejalan dari zaman yang semakin berkembang dan seiring berkembangnya ilmu pengetahuan yang semakin maju. Sehingga fenomena tersebut sudah seharusnya menjadi perhatian utama dalam pembuatan keputusan di dalam pemerintahan. (Kakisina, 2020, hal.54)

Laporan keuangan pada dasarnya adalah laporan kewajiban. orang atau karyawan yang bekerja di bagian keuangan pemerintahan dan laporan

keuangan disusun dan disajikan setiap setahun. karena laporan merupakan gambaran keuangan yang terdiri dari transaksi atau peristiwa situasi yang terjadi pada suatu entitas tertentu. Selain itu, laporan keuangan adalah sumber informasi yang membantu pemerintah membuat kebijakan dan keputusan, begitu juga bagi entitas yang tidak berafiliasi dengan pemerintah, seperti perusahaan, bank, investor, dan potensi investor.

Untuk mencapai tujuan reformasi tersebut, banyak hal yang berubah. Salah satunya adalah penerapannya dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang- undang ini

memberikan pemerintah daerah lebih banyak kekuasaan. Salah satu keuntungan yang dimaksud adalah kemampuan untuk memobilisasi sumber dana serta menentukan jalan, tujuan, dan tujuan anggaran.

Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai telah menerapkan PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah tentang penyajian laporan keuangan berbasis akrual. Hal ini terjadi karena peraturan standar akuntansi pemerintah telah berubah dari berbasis kas menjadi berbasis akrual, dan pelaksanaannya masih perlahan karena kurangnya sumber daya manusia yang memahami akrual. Kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai akan menurun karena kurangnya pemahaman tentang standar akuntansi pemerintah ini.

Kemudian berdasarkan survei yang dilakukan terhadap SKPD Kabupaten Serdang Bedagai, ternyata pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah pada umumnya belum optimal. Hal ini terlihat dari fakta bahwa ada beberapa SKPD yang belum menyusun laporan keuangan berbasis akrual. Akibatnya, informasi keuangan yang dihasilkan tidak sepenuhnya dapat diandalkan dan bermanfaat. Selain itu, masih ada SKPD yang menggunakan sistem informasi secara manual sehingga masih terdapat kesalahan dalam penyajian laporan keuangan.

Dengan demikian, untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah yang berbasis akrual diperlukan penerapan sistem informasi akuntansi keuangan daerah yang optimal dengan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas serta adanya aplikasi yang efisien dan ekonomis seperti SIMDA yang mampu mengintegrasikan seluruh data keuangan daerah sehingga menghasilkan laporan keuangan yang andal dan tepat waktu, karena itu peneliti mengambil Judul "Analisis Penerapan Sistem

Informasi Akutansi dalam meningkatkan Kualitas laporan Keuangan Pemerintah daerah (study kasus Pada kantor camat Tebing Syahbandar Kab Serdang Bedagai)". Tujuan penelitian diperlukan untuk memberikan arah dalam melangkah dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengevaluasi pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah yang berbasis akrual. 2 Untuk megetahui efektifitas dan efisiensi penggunaan aplikasi SIMDA dalam pengelolaan keuangan daerah. 3.Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasi sistem akuntansi keuangan daerah berbasis akrual di Kabupaten Serdang Bedagai. 4.Untuk memberikan rekomendasi perbaikan dalam pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah guna meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana peneliti akan mengumpulkan data dengan cara observasi, mengumpulkan data di lapangan, dan langsung melakukan wawancara dengan cara langsung mendatangi narasumber di tempat penelitian, wawancara dilakukan dengan bagian keuangan. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami kejadian apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, kebiasaan, dan lainnya secara menyeluruh yang berhubungan dengan topik penelitian dan dijelaskan secara deskripsi menggunakan kata-kata

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian ini di Kantor Camat Tebing Syahbandar

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah dengan menggunakan teknik pengamatan (observasi), wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan.

Menurut Sugiyono (2013:89) analisis data adalah proses mencari dan menyusun

data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN Laporan Operasional

Laporan Operasional menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya mencakup unsur pendapatan dan beban selama periode 01 Januari 31 Desember 2023.

Tabel 1. Kantor Camat Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai Laporan Operasional Per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023
PENDAPATAN		
PENDAPATAN ASLI DAERAH		
Retribusi Jasa Umum	15.000.000	14.500.000
Pendapatan Lain-Lain	5.000.000	5.250.000
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	20.000.000	19.750.000
JUMLAH PENDAPATAN	20.000.000	19.750.000
BELANJA		
BELANJA OPERASI		
Belanja Pegawai	1.200.000.000	1.150.000.000
Belanja Barang dan Jasa	250.000.000	225.000.000
Belanja Pemeliharaan	50.000.000	45.000.000
Jumlah Belanja Operasi	1.500.000.000	1.420.000.000
SURPLUS/DEFISIT	(1.500.000.000)	(1.420.000.000)

Pada tahun anggaran 2023, Kantor Camat Tebing Syahbandar mencatat total pendapatan sebesar Rp. 19.750.000, sedikit di bawah anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000. Pendapatan ini terdiri dari dua komponen utama: retribusi jasa umum yang mencapai Rp. 14.500.000 dan pendapatan lain-lain sebesar Rp. 5.250.000. Meskipun terjadi penurunan pendapatan dibandingkan anggaran, realisasi pendapatan ini tetap menunjukkan kestabilan yang mendukung kelancaran kegiatan operasional kantor. Penurunan ini tidak terlalu signifikan, dan pengelolaan pendapatan masih dapat dikategorikan memadai.

Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan keuangan Kantor Camat Tebing Syahbandar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan peraturan pemerintah yang berlaku. Laporan ini menggunakan dasar akrual, yang mengakui transaksi pada saat terjadinya, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Aset dikategorikan menjadi aset lancar dan aset tetap. Aset lancar meliputi kas dan setara kas yang tercatat sebesar Rp. 5.000.000, piutang retribusi jasa umum sebesar Rp. 2.000.000, dan persediaan barang sebesar Rp. 1.000.000. Sementara itu, aset tetap mencakup tanah dan bangunan yang tercatat sebesar Rp. 12.000.000, kendaraan dinas Rp. 3.500.000, dan peralatan kantor Rp. 1.200.000, menunjukkan investasi yang

terus meningkat dalam mendukung kegiatan operasional.

Pembahasan

1 Efektivitas Penerapan SIMDA di Kantor Camat Tebing Syahbandar

Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam pengelolaan keuangan berbasis akrual telah membawa perubahan signifikan dalam cara Kantor Camat Tebing Syahbandar mengelola, mencatat, dan melaporkan keuangan mereka. Sistem akuntansi berbasis akrual yang diadopsi oleh SIMDA memungkinkan pengakuan pendapatan dan beban pada saat terjadinya transaksi, bukan hanya saat kas diterima atau dibayarkan, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan lebih akurat dan mencerminkan kondisi keuangan yang sesungguhnya. Dengan kemampuan mencatat transaksi secara rinci, termasuk piutang dan utang, SIMDA mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Hasil wawancara dengan beberapa pegawai Kantor Camat Tebing Syahbandar menunjukkan bahwa SIMDA sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan transaksi harian serta penyusunan laporan bulanan. Salah seorang responden yaitu Pejabat Administratur menyatakan bahwa, *“SIMDA sangat memudahkan dalam pencatatan transaksi harian dan pelaporan secara bulanan. Sebelumnya, kita harus melakukan pencatatan manual yang rawan kesalahan.”* Dukungan SIMDA terhadap proses pencatatan digital tidak hanya meminimalkan kesalahan manual tetapi juga meningkatkan efisiensi waktu dan akurasi dalam penyusunan laporan.

2. Kesesuaian SIMDA dengan Kebutuhan Pengguna Di Lapangan

Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) merupakan alat yang

efektif dan efisien dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah, asalkan memenuhi beberapa indikator utama yang diperlukan dalam penerapannya. Salah satu indikator penting adalah keandalan sistem. SIMDA harus dapat beroperasi dengan baik tanpa gangguan, terutama pada saat-saat krusial seperti penyusunan anggaran dan laporan keuangan. Selain itu, SIMDA perlu memiliki antarmuka yang ramah pengguna (user-friendly), sehingga pegawai dapat dengan mudah memahami dan memanfaatkan fitur-fiturnya. Kemudahan akses ini memungkinkan pengguna untuk cepat beradaptasi dan menjalankan sistem secara optimal.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa para responden mengakui perlunya pelatihan tambahan untuk meningkatkan pemahaman pegawai terhadap fitur-fitur SIMDA. Salah satu staf bagian Keuangan menyebutkan, *“Pelatihan yang diberikan terbatas, sehingga masih ada beberapa fitur di SIMDA yang belum kami pahami sepenuhnya.”* Keterbatasan ini menjadi kendala yang menurunkan potensi efektivitas SIMDA dalam pelaporan keuangan.

Menurut Ahli Sistem Informasi (Operator SIMDA), penerapan sistem informasi akuntansi di Kantor Camat Tebing Syahbandar telah memberikan dampak positif yang signifikan dalam pengelolaan keuangan. Operator menyatakan bahwa penerapan sistem ini telah meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan keuangan. Ia menjelaskan, *“Proses pencatatan dan pelaporan kini lebih terstruktur dan transparan, memudahkan monitoring dan audit.”* Meski begitu, operator juga mengungkapkan bahwa masih ada beberapa area yang membutuhkan perbaikan. Di antaranya adalah peningkatan pengalaman pengguna (user experience) serta penanganan terhadap gangguan teknis yang kadang terjadi, yang dapat menghambat kelancaran penggunaan sistem.

3 Dampak SIMDA terhadap Kualitas

Laporan Keuangan

Implementasi SIMDA di Kantor Camat Tebing Syahbandar telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. SIMDA membantu memastikan seluruh data keuangan dicatat secara sistematis dan akurat, yang memungkinkan laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih terstruktur, transparan, dan tepat waktu. Peningkatan kualitas ini tercermin dalam kemudahan proses pencatatan dan pelaporan, sehingga proses audit menjadi lebih sederhana dan akurat.

SIMDA tidak hanya mendukung pengelolaan data tetapi juga memudahkan pelacakan dan verifikasi transaksi, yang pada akhirnya mengurangi risiko kesalahan dan ketidaksesuaian data. Salah satu auditor keuangan yang diwawancara menyatakan, *“Dengan SIMDA, kami dapat memantau setiap transaksi dan memastikan keakuratannya, sehingga meminimalisir potensi kesalahan atau bahkan penyelewengan data.”* Hal ini menunjukkan bahwa SIMDA berperan penting dalam meningkatkan integritas data keuangan, sebuah aspek yang juga diidentifikasi oleh penelitian Harahap (2017) sebagai manfaat utama SIMDA dalam pengelolaan keuangan daerah itu, penggunaan SIMDA meningkatkan efisiensi dalam penyusunan laporan keuangan tahunan, bulanan, dan harian. Sistem ini menyajikan informasi secara real-time sehingga pegawai dapat mengakses data terbaru kapan pun diperlukan. Kemampuan untuk mengakses data real-time ini mempercepat penyusunan laporan dan memungkinkan pemantauan keuangan yang lebih efektif. Menurut penelitian Sutrisno (2019), sistem yang menyediakan data secara langsung berperan penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis bukti .

4. KESIMPULAN

Pemanfaatan Sistem Informasi

Manajemen Daerah (SIMDA) dalam pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual telah membawa transformasi signifikan dalam cara pemerintah daerah mengelola, mencatat, dan melaporkan keuangan mereka. SIMDA membantu dalam meningkatkan akurasi, transparansi, dan kecepatan proses penyusunan laporan keuangan di Kantor Camat Tebing Syahbandar. Sistem ini mendukung pencatatan yang lebih akurat dan memungkinkan pelacakan transaksi secara real-time, sehingga mempermudah proses audit dan pengawasan. Aplikasi SIMDA terbukti efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan daerah, tetapi agar optimal, SIMDA perlu memenuhi beberapa indikator utama, seperti keandalan sistem, kemudahan akses, dan dukungan infrastruktur teknologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas SIMDA masih bergantung pada kualitas jaringan internet yang stabil dan kemampuan pengguna dalam mengoperasikan sistem. Pelatihan tambahan juga dibutuhkan bagi pegawai agar mereka dapat memahami fungsi-fungsi SIMDA secara menyeluruh dan memanfaatkan sistem ini dengan optimal dalam penyusunan laporan keuangan. Implementasi SIMDA telah memberikan dampak positif terhadap kualitas laporan keuangan di Kantor Camat Tebing Syahbandar. Dengan dukungan sistem berbasis akrual, SIMDA memungkinkan laporan keuangan yang lebih terstruktur, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Namun, terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan infrastruktur, integrasi data antar unit yang belum optimal, serta resistensi pegawai terhadap sistem baru. Kendala-kendala ini perlu diatasi melalui peningkatan infrastruktur, pelatihan intensif, dan manajemen perubahan yang baik untuk memastikan bahwa SIMDA dapat memberikan manfaat maksimal dalam pengelolaan keuangan daerah

5. REFERENSI

BPS Kota Medan. (2020). Kecamatan Medan Sunggal Dalam Angka 2019. (Vol. 59).

Djanegara, M. S. (2020). Laporan

- Keuangan Pemerintah Daerah. Bogor: KESATUAN PRESS.
- Desnovira, April (2020). Perbandingan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Opd Kecamatan Salimpaung Sebelum Dan Setelah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Iain Batusangkar
- Fauziah, I. (2021). Standar Akuntansi Pemerintah. Jakarta: Penerbit Ilmu.
- Fauziyah, E. M. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Aparatur Pemerintah Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi (Pada Organisasi Perangkat Daerah di K. Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa, 4(2), 196–209. <https://doi.org/10.48181/jratirtayasa.v4i2.6386>
- Febransyah, Astari, Dinda. (2021). Analisis Tingkat Pemahaman Akuntansi Berbasis Akrual Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kantor Camat Tanjung Batu Kab. Ogan ILIR. Jurnal Ratri (Riset Akuntansi Tridinanti), Vol 2 (No 2).
- Husna, Ade,dkk. (2022). Pengaruh Kompetensi Pengelolaan Keuangan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar. Jurnal Serambi Konstruktiv, Vol 4 (Nomor 2),
- Iii, B. A. B., & Penelitian, A. J. (2021). M. Natsir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalis Indonesia,1999) h. 234 45. 45–51.
- Kakisina, S. M. (2020). Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Pada Kantor Kecamatan Gunungsitoli Utara. Jurnal Akuntansi Dan Manajemen PEMBNAS,7(1),53–62. <https://ejournal.stiepembnas.ac.id/index.php/jampembnas/article/view/95%0Ahttps://ejournal.stiepembnas.ac.id/index.php/jampembnas/article/viewFile/95/55>
- Onsardi, Marini, & Selvia, E. (2020). Accountability in the Management of Village Fund From The Islam Perspective. Jurnal Ilmiah Akuntansi. Vol 4 (No.3)
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Media Hukum, 184.
- Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor b238/PMK.05/2011(2011). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/127242/pmk-no-238pmk052011>
- Pratama, W. W. (2020). Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Kantor Camat Tebing Syahbandar). Medan.
- Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Kebijakan Akuntansi, 2013.
- Siregar, S. (2020). Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Sesuai PSAK 109. Medan: Wal Ashri Publishing.
- Suhendra, J. d. (2020). Akuntansi Pemerintah Edisi 1. Bandung: CV.MEDIA SAINSINDONESIA.
- Suryanto. (2021). Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Jurnal Agregasi, Volume 7 (Nomor2). <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/a>

gregasi

Susanti, H. K. (2020). Akuntansi Pemerintah. Bandung: CV. MEDIA SAINS INDONESIA.

Zeny Antika, Yunika Murdayanti, & Hafifah Nasution. (2020). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 15(2), 212–232.
<https://doi.org/10.21009/wahana.15.027>